

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi dari waktu ke waktu yang dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi dengan menggunakan satuan per waktu untuk pengukuran (Aritonang, Murbun, Simatupang, Zuliyansah, & Rangkuty, 2023). Adanya pertumbuhan penduduk dipengaruhi dengan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Populasi yang semakin bertambah berdampak terhadap usia produktif. Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan yang di mana jumlah penduduk berusia produktif yaitu, 15 – 64 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia nonproduktif yaitu, di atas 65 tahun (Kominfo, 2020). Hal ini, harus menjadi fokus pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan terutama di era teknologi yang semakin maju.

Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi sehingga dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input yang sama (Ningsih, 2024). Perkembangan teknologi yang semakin maju berpengaruh terhadap pola pikir seseorang di jaman sekarang. Beberapa orang memiliki pola pikir dalam memprioritaskan pendidikan agar menjadi pribadi yang berkualitas dan berilmu. Namun, sebagian orang juga memiliki pola pikir realistis dalam kehidupan, mereka lebih memilih untuk bekerja meskipun hanya lulusan sekolah.

Saat ini, persyaratan dalam penerimaan tenaga kerja baru semakin ketat dan berdasarkan kriteria yang tepat. Persyaratannya mencakup berbagai hal seperti, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, kemampuan interpersonal, sertifikasi profesional, dan sifat – sifat pribadi tertentu (Hidayat, 2023). Hanya beberapa orang yang sesuai dan tepat dengan kriteria lowongan pekerjaan. Faktanya, seseorang yang sudah berpendidikan tinggi tidak tentu memiliki pengalaman dan kemampuan. Sebaliknya, seseorang yang hanya lulusan sekolah bisa saja memiliki pengalaman lebih dibandingkan yang berpendidikan tinggi. Ketepatan kriteria dalam lowongan pekerjaan tergantung

bagaimana perusahaan dapat menerima calon pekerja serta mentoleransikan kriteria yang tidak sesuai.

Pelatihan kerja atau *employee training* sangat penting, diharapkan setiap perusahaan mengadakannya agar kinerja para karyawan meningkat, hal ini sudah tertera dalam PP No. 31 Tahun 2006 tentang pelatihan kerja (Bisma, 2024). Pelatihan dapat menjadi wadah dalam mengembangkan kualitas tenaga kerja sehingga seseorang mampu memperoleh wawasan yang lebih spesifik di bidangnya. Kualitas dan kemampuan yang semakin berkembang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Demi mewujudkan keberhasilan perusahaan, maka diperlukan karyawan yang memiliki tingkat keterampilan kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan mutu produktivitas kerja karyawan pada suatu perusahaan (Syahdan, 2017). Produktivitas tenaga kerja mendukung peningkatan pendapatan suatu perusahaan sehingga naik atau turunnya produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Selain produktivitas, perusahaan juga harus fokus dalam keselamatan kerja karyawan. Pentingnya perlindungan bagi pekerja agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan badannya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan yang diikuti, hal ini tercantum dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang pendaftaran peserta (BPJS Ketenagakerjaan, n.d.). Mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta merupakan bentuk timbal balik perusahaan atas produktivitas tenaga kerja yang menjadi pengaruh meningkatnya pendapatan. BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai lembaga jaminan sosial yang berguna untuk perlindungan terhadap kecelakaan kerja atau perlindungan sosial. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

Adapun pengelompokkan peserta di BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi empat yaitu, penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia. Penerima upah adalah peserta yang memiliki badan usaha dengan minimal dua tenaga kerja atau peserta yang bekerja di badan usaha

sebagai tenaga kerjanya. Bukan penerima upah adalah peserta yang tidak bekerja dalam sebuah badan usaha seperti, ojek *online*, peserta magang, *freelance*, dan lain-lain. Jasa konstruksi adalah peserta yang bekerja di proyek bangunan dan memiliki kontrak kerja. Sedangkan pekerja migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi empat yaitu, penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia. Penerima upah adalah peserta yang memiliki badan usaha dengan minimal dua tenaga kerja atau peserta yang bekerja di badan usaha sebagai tenaga kerjanya. Bukan penerima upah adalah peserta yang tidak bekerja dalam sebuah badan usaha seperti, ojek *online*, peserta magang, *freelance*, dan lain-lain. Jasa konstruksi adalah peserta yang bekerja di proyek bangunan dan memiliki kontrak kerja. Sedangkan pekerja migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

Setiap peserta mendapatkan manfaat melalui program – program yang tersedia di BPJS Ketenagakerjaan. Program di BPJS Ketenagakerjaan difokuskan untuk pekerja dalam melindungi kondisi yang memungkinkan terjadi. Dilansir dari laman BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan bahwa terdapat lima program penerima upah yaitu, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, terdapat juga tiga program bukan penerima upah yaitu, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, jaminan hari tua. Program di jasa konstruksi sama dengan program bukan penerima upah yang membedakan hanya tidak terdapat jaminan hari tua. Terdapat tiga program pekerja migran Indonesia yaitu, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

Para peserta dapat mengklaim jaminan yang tersedia dengan sangat mudah. Proses yang terbilang cepat, sangat membantu peserta dalam pengklaiman sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Syarat yang diperlukan juga dapat ditemukan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa kriteria dalam

pengklaiman program. Salah satunya pengklaiman program jaminan hari tua memiliki kriteria yaitu, berhenti bekerja atau berhenti usaha (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Selain itu, kriteria pengklaiman program jaminan pensiun adalah mencapai usia pensiun (56 tahun) sedangkan kriteria pengklaiman program jaminan kehilangan pekerjaan adalah peserta mengalami pemutusan kerja. Namun, terdapat program di BPJS Ketenagakerjaan yang tidak memiliki kriteria yaitu, program jaminan kematian dan program jaminan kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Diantara semua program yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan hari tua menjadi program yang paling diminati karena syarat dan kriteria sangat mudah. Tidak sedikit peserta yang mengajukan pengklaiman program jaminan hari tua sedangkan program yang jarang dilakukan pengklaiman ialah jaminan kehilangan pekerjaan (KAP Kanaka Puradiredja, 2022).

Iuran dan klaim program erat kaitannya, adanya iuran sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab peserta agar suatu saat dapat melakukan pengklaiman. Iuran setiap peserta dikelola dalam dana jaminan sosial yang berfungsi untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2022). Pengklaiman setiap program di BPJS Ketenagakerjaan tercatat dalam laporan keuangan. Setiap peserta mengajukan pengklaiman dapat mempengaruhi akun - akun tertentu dalam laporan BPJS Ketenagakerjaan.. Akun yang berpengaruh ketika terjadinya pengklaiman suatu program yaitu, kas di bank, beban jaminan, utang jaminan, dan pendapatan iuran (BPJS Ketenagakerjaan, 2022). Muncul akun utang jaminan saat terjadinya pengklaiman program BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum dilakukan pengklaiman, peserta mempunyai kewajiban melunasi iuran yang harus dilunaskan sehingga akun yang berpengaruh yaitu, piutang iuran. Akun utang jaminan dan piutang iuran erat kaitannya karena sebelum dilakukan pengklaiman peserta wajib melunasi iuran. Hal ini, juga dapat mempengaruhi akun surplus di BPJS Ketenagakerjaan. Uji coba dilakukan untuk melihat pengaruh akun utang jaminan dan piutang iuran terhadap surplus ketika terjadinya pengklaiman program BPJS Ketenagakerjaan.

Setiap peserta yang mendaftar harus menjadi fokus BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan kepercayaan kepada setiap peserta dengan berkomitmen dan bertanggung jawab terkait pengklaiman suatu program jaminan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan analisis laporan keuangan di BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui bagaimana kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dalam membayar kewajiban bagi setiap peserta yang mengajukan klaim program jaminan. Selain itu, untuk mengetahui apakah akun utang jaminan dan piutang iuran berpengaruh terhadap surplus atau hanya salah satunya. Penilaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan diukur menggunakan rasio likuiditas dan solvabilitas. Penulis memutuskan untuk memberi judul **ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PENGKLAIMAN PROGRAM JAMINAN BPJS KETENAGAKERJAAN.**

## **1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir**

Setiap peserta yang melakukan klaim program jaminan mempengaruhi laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Tanggung jawab yang besar untuk setiap peserta agar program jaminan terklaim secara maksimal. Menganalisis laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan berguna untuk menunjukkan kemampuan dalam melunasi kewajiban sehingga peserta mempercayai BPJS Ketenagakerjaan. Menganalisis juga berguna untuk melihat pengaruh akun utang jaminan dan piutang iuran terhadap surplus. Dilakukan dengan perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta mengolah data dengan cara analisis regresi.

## **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir yaitu, untuk mengetahui kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi kewajiban setiap peserta melakukan pengklaiman program jaminan serta untuk menguji pengaruh akun utang jaminan dan piutang iuran terhadap surplus.

## **1.4 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir yaitu, mengetahui bagaimana kinerja BPJS Ketenagakerjaan untuk melunasi kewajiban dan menepati kesanggupan permintaan klaim dari peserta, mengetahui pengaruh setiap terjadinya pengklaiman program BPJS Ketenagakerjaan terhadap surplus, meningkatkan wawasan mengenai praktik akuntansi sesuai dengan kondisi, dan menumbuhkan rasa kepercayaan bagi setiap peserta dan calon peserta bahwa pengklaiman dapat dilakukan penuh.